

**PENGARUH EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL,  
BUDAYA ETIS ORGANISASI, MORALITAS INDIVIDU, DAN  
KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP  
KECENDERUNGAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA  
DESA  
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Loano Kabupaten  
Purworejo)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :  
**Aditya Tri Pamungkas**  
NIM : 18.0102.0088

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan yang akan dipertanggungjawab oleh kinerja pemerintah terhadap masyarakat sebagai bentuk transparansi atau bentuk akuntabilitas. Pesatnya perkembangan akuntansi membawa dampak bagi masyarakat, yaitu memberikan manfaat terkait informasi keuangan. Manfaat lain yaitu menjadikan sumber kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan seperti korupsi, memanipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset (Muna & Harris, 2018).

Tindakan kecurangan atau *fraud* adalah suatu bentuk tindakan yang melawan hukum berupa penipuan yang sengaja dilakukan baik oleh individu maupun kelompok agar mendapatkan keuntungan dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Kecurangan akuntansi sangat erat terkait dengan korupsi. Tindakan-tindakan kecurangan akuntansi meliputi manipulasi, salah saji, dan penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang ataupun kelompok dalam menyajikan laporan keuangan.

Di berbagai negara termasuk di Indonesia, *fraud* terjadi karena penyalahgunaan aset baik terjadi di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Amrizal (2015) menyatakan bahwa, pengendalian internal yang rendah, karyawan yang tidak jujur dan tidak mempunyai kredibilitas serta model tata

kelola yang sempit atau sedang melakukan penyelewengan merupakan dasar yang menyebabkan terjadinya tindak *fraud*.

Di Indonesia kasus korupsi yang rentan terjadi pada anggaran dana desa. Berdasarkan data ICW tahun 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dilakukan oleh perangkat desa setelah ASN dan pihak swasta. Kerugian Negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparat desa mencapai Rp 111 miliar. Maka dari itu ICW meminta pemerintah untuk mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa, hal tersebut dikutip dari ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)). Pada tahun 2021, dari pantauan ICW, ada 1.298 terdakwa yang disidangkan dalam kasus korupsi dana desa sepanjang 2021. Dari jumlah itu sebanyak 330 orang di antaranya adalah perangkat desa. Selain itu, dalam tren penindakan ICW mencatat pada semester pertama 2021, korupsi yang dilakukan oleh kepala desa menempati tiga besar. Sementara sektor dana desa korupsinya nomor empat tertinggi pada semester pertama 2021 ([www.nasional.tempo.co/](http://www.nasional.tempo.co/)).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjend Pol Bahtiar Ujang Purnama, mengaku prihatin karena dari tahun 2012 sampai 2021 ini setidaknya ada 9 kepala daerah di Jawa Tengah yang terseret kasus korupsi. Antara lain, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sragen, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banjarnegara ([www.Jatengprov.go.id](http://www.Jatengprov.go.id)).

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Tahun 2021, total Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa.

Sebagian kasus korupsi yang ada di Jawa Tengah adalah seperti kasus korupsi di rentan waktu 2019-2022 terjadi di beberapa kabupaten yang ada di Jawa tengah, salah satunya terjadi di Karesidenan Kedu. Berikut merupakan jumlah kasus korupsi pengelolaan dana desa 4 tahun terakhir menurut kabupaten yang ada di karesidenan kedu.

**Tabel 1. 1**  
**Korupsi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Kabupaten Karesidenan Kedu Tahun 2019-2022**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kasus
1.	Kabupaten Kebumen	2
2.	Kabupaten Magelang	2
<b>3.</b>	<b>Kabupaten Purworejo</b>	<b>3</b>
4.	Kabupaten Temanggung	2
5.	Kabupaten Wonosobo	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

*Sumber : olah data peneliti dari beberapa sumber*

Berdasarkan data yang ada menyatakan bahwa kabupaten Purworejo merupakan kabupaten/kota yang masuk dalam Karesidenan Kedu dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yaitu sejumlah 3 kasus. Kabupaten Purworejo terbagi atas 16 kecamatan, 494 desa/kelurahan. Kasus korupsi dana desa yang

terjadi di kabupaten purworejo jenisnya bermacam, kerugian yang dihasilkan juga bervariasi dan kecamatan terjadinya korupsi juga berbeda. Berikut merupakan tabel penjabaran secara rinci korupsi yang terjadi di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2022.

**Tabel 1. 2**  
**Kasus Korupsi Dana Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Kecamatan	Kerugian Negara
1.	2019	Butuh	Rp. 350.000.000
2.	2020	Kemiri	Rp. 1.039.859.456
<b>3.</b>	<b>2021</b>	<b>Loano</b>	<b>Rp. 607.741.082</b>

*Sumber : olah data peneliti dari beberapa sumber (purworejokab.go.id)*

Berdasarkan data di atas Kecamatan Loano merupakan salah satu kecamatan yang melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* yaitu dengan menyalahgunakan dana desa untuk keperluan pribadi seorang mantan Kades Tridadi. Terdapat 3 kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Kecamatan Loano menjadi kecamatan yang terbaru dalam melakukan tindakan korupsi pada tahun 2021 dengan kerugian negara sebesar Rp. 607.741.082. Tindakan *fraud* yang dilakukan dengan memanipulasi faktur pembelian material untuk pembangunan dan juga menggunakan laporan fiktif. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa di Desa Tridadi belum dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa. Di dalam kasus tersebut tidak ada perangkat desa lain yang turut untuk melakukan tindakan *fraud*.

Penelitian-penelitian mengenai tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa telah banyak dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, salah satunya adalah

sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang terdapat dalam instansi atau organisasi tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja, akan tetapi meliputi segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Pengendalian internal sangat penting dilakukan untuk meminimalisir adanya kecurangan ataupun kesempatan terjadinya perilaku menyimpang dari aturan yang ada. Karena seseorang yang akan melakukan tindakan itu disebabkan oleh niat dan kesempatan yang ada. Kesempatan terjadinya *fraud* dapat dicegah dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan baik. Semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan maka upaya pencegahan tindakan *fraud* akan semakin baik. Menurut (Widiyarta et al, (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Najahningrum, 2013), (Pramudita, 2013), dan (Zulkarnain, 2013) menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan adanya tingkat kecurangan yang akan dilakukan, dan sebaliknya sistem pengendalian internal yang buruk maka hal tersebut akan menjadi kesempatan bagi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Menurut penelitian (Rahmi & Sovia, 2017) dan (Maulidya & Fitri, 2020) menunjukkan hasil keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi et al., (2016) dan Rahmah & Haryoso (2018) yang menyatakan bahwa

keefektifan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*.

Faktor kedua yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah budaya etis organisasi. Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat di dalam organisasi yang telah disetujui oleh semua anggota organisasi yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitas. Budaya etis organisasi merupakan nilai dan norma berbudi luhur yang mengarah pada perilaku semua anggota dari suatu organisasi suatu entitas. Menurut Nashruah & Wijayanti, (2019) budaya etis organisasi yang kokoh dapat menurunkan kecenderungan *fraud* akuntansi, dengan membangun budaya etis organisasi perilaku seseorang dapat terpengaruhi dan budaya organisasi yang etis diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja organisasi. Rae & Subramaniam (2008) organisasi yang mempunyai perilaku yang etis dan lingkungan yang baik maka individu akan lebih cenderung melakukan sesuatu hal yang baik sesuai dengan peraturan dan menghindari tindakan kecurangan. Penelitian Widiyarta et al, (2017) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Ismi et al., (2018) budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian dari Rodiah et al., (2019) budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah moralitas individu. Setiap individu dalam organisasi pasti memiliki tingkat moralitas yang beraneka ragam dan akan mempengaruhi tren kecurangan. Moralitas merupakan nilai-nilai tertentu yang dianggap baik atau buruk oleh orang lain, dan dapat membedakan antara yang layak atau tidak layak untuk dilakukan. Salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan munculnya *fraud* adalah perilaku individu. Perilaku individu dapat menjadi faktor munculnya *fraud*, apabila individu tersebut memiliki moral yang buruk maka meskipun dengan efektifnya pengendalian internal suatu entitas individu akan tetap mencari kesempatan untuk melakukan kecurangan. Penelitian Yulianti (2016) dan Fitri (2016) menunjukkan hasil moralitas individu berpengaruh positif terhadap *fraud*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Indriastuti et al., (2017) dan Dewi & Saiful, (2021) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*.

Faktor keempat yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam penggunaan dana desa adalah kesesuaian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Padhilah & Burhany, 2020). Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi bagi karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Sebaliknya apabila seorang karyawan merasa kompensasi

yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah mereka berikan kepada perusahaan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Penelitian Adi et al., (2016) dan Arthana, (2019) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Berbeda dengan penelitian Permatasari et al., (2017) dan Albar & Fitri, (2018) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari (Dewi & Saiful, 2021) dengan persamaan meneliti tentang kecenderungan *fraud* dengan menggunakan variabel efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, **pertama** menambah variabel Budaya Etis Organisasi yang diambil dari penelitian (Rodiah et al., 2019) karena budaya etis organisasi dalam suatu instansi dapat meminimalisir tindakan *fraud*. Kesadaran tentang adanya *fraud* dapat dimasukkan ke dalam suatu budaya etis organisasi, dalam hal ini pengertian budaya etis organisasi merupakan sistem yang dianut oleh anggota organisasi atau entitas yang dapat membedakan diri dengan yang lainnya. Widiyarta et al, (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem yang memiliki makna yang dianut sama oleh anggotanya yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya.

**Kedua**, objek dari penelitian ini di Kecamatan Loano, karena di Kecamatan Loano ini pernah terjadi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa ([www.purworejo24.com](http://www.purworejo24.com), 2021). Faktor-faktor yang

menyebabkan aparatur desa melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran hingga terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa kemungkinan adalah lemahnya pengendalian internal, budaya etis organisasi, moral individu, dan kurangnya kesesuaian kompensasi yang diterima aparatur desa. Dari faktor-faktor tersebut oknum yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindak kecurangan. Kecurangan dapat dicegah apabila pengendalian internal dijalankan dengan efektif dan juga baik. Seseorang yang memiliki moral yang tinggi dan baik akan lebih memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari kecurangan untuk diri sendiri. Budaya etis organisasi merupakan norma yang harus diikuti oleh aparatur desa, dengan demikian budaya etis organisasi ini dapat meminimalisir tindakan kecurangan.

Dengan adanya permasalahan tindak kecurangan disalah satu desa di Kecamatan Loano maka perlu adanya pencegahan tindakan kecurangan atau *fraud*. Sehingga dilakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, Moral Individu, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis efektifitas pengendalian internal mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis budaya etis organisasi mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis moralitas individu mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis kesesuaian kompensasi mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu akuntansi yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan menambah wawasan.

### b. Bagi pembaca :

Penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan mengenai perilaku *fraud* yang dinilai merugikan banyak pihak.

### c. Bagi Pemerintah Desa :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada Pemerintah Desa dan memberikan pedoman untuk menjauhi perilaku *fraud*.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang telaah teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan model penelitian.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan tentang hasil dan pembahasan permasalahan melalui uji kualitas data yaitu validitas, uji reliabilitas, uji analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji f, dan uji t.

#### BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, kesimpulan dan saran untuk penelitian kembali.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Teori

##### 1. Teori Fraud Pentagon

Teori ini dijabarkan oleh C. Horwarth (2011) teori ini merupakan pengembangan dari fraud triangle theory yang dijabarkan oleh Cressey (1950). Di dalam teori pentagon terdapat lima faktor yang mempengaruhi *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).

Aplikasi dari *teori pentagon* terhadap penelitian ini menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai pengelola keuangan desa yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan bertindak sesuai dengan tugas dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam *teori pentagon* memiliki tiga tahapan dalam analisisnya, yang pertama yaitu *pressure*, dimana seorang aparatur desa mempunyai niat untuk melakukan tindakan kecurangan. Yang kedua yaitu *opportunity*, dimana aparatur desa akan melakukan tindakan kecurangan apabila terdapat kesempatan untuk melakukannya. Terdapat kesempatan itu terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah, dan peraturan organisasi yang kurang ketat. Tahap yang ketiga yaitu *rationalize*, dimana seorang aparatur desa memiliki situasi yang cukup menekan sehingga aparatur desa akan menganggap hal tersebut menjadi wajar dan membenarkan segala tindakannya. Tahap yang keempat yaitu *competence* dimana seorang aparatur desa dengan kemampuan yang

kurang maka akan mengabaikan kontrol internalnya. Tahap yang kelima yaitu *arrogance*, dimana seorang aparatur desa akan memiliki sikap superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan atau kebijakan suatu organisasi atau perusahaan tidak berlaku bagi dirinya.

## **2. Fraud**

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan secara sengaja oleh individu atau lebih yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.

Menurut Ayem & Kusumasari (2020) bahwa kecurangan adalah suatu tindakan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku kemudian dilakukan secara sengaja dengan mempunyai tujuan tertentu yang mengharapkn keuntungan bagi kelompok ataupun individu sehingga merugikan pihak lain.

## **3. Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

1) Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2) Pelaksanaan

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa.

4) Pelaporan

Pelaporan adalah melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan, kepala desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana desa.

#### **4. Efektivitas Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian intern (SPI) merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal adalah beberapa prosedur dimana bertujuan untuk melindungi aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi dari segala tindakan kecurangan, tidak hanya itu sistem pengendalian internal juga dapat menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat dan tepat, serta dapat memberi kepastian kepada semua ketentuan hukum beserta kebijakan manajemen yang telah dipatuhi dan dijalankan sebagai mestinya. Menurut (Romney et al., 2015), pengendalian internal merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki masalah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, serta terhindar dari kesalahan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Aparatur desa dituntut untuk melakukan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien guna untuk mengawasi dan mengontor tindakan

kecurangan yang akan dilakukan oleh aparaturnya, karena sistem pengendalian internal ini akan menjadi tanggungjawab bersama. Tindakan kecurangan dapat dicegah dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan efisien dan efektif yang dilakukan suatu organisasi. Semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan maka upaya pencegahan tindakan kecurangan akan semakin baik.

## **5. Budaya Etis Organisasi**

Budaya etis organisasi merupakan nilai dan norma berbudi luhur yang mengarah pada perilaku semua anggota dari suatu organisasi atau entitas. Perilaku tidak etis dapat diartikan dengan menyimpangnya perilaku dari anggota organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu. Budaya etis organisasi yang kuat dapat menurunkan kecenderungan *fraud* akuntansi, dengan membangun budaya etis organisasi perilaku seseorang dapat terpengaruhi dan budaya organisasi yang etis diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja organisasi (Nashruah & Wijayanti, 2019).

Budaya etis organisasi yang baik sangat penting dalam mencegah tindakan kecurangan. Tindakan pencegahan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik dimana budaya tersebut akan menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti menjunjung tinggi kejujuran, integritas dan lain-lain dengan adanya budaya etis organisasi yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya.

## 6. Moralitas Individu

Moralitas adalah nilai-nilai tertentu yang dianggap baik atau buruk, dan dapat membedakan mana yang pantas atau tidak untuk dilakukan. Setiap individu memiliki tingkat moralitas yang berbeda-beda dan akan mempengaruhi tren kecurangan akuntansi. Maka dari itu, individu yang memiliki kemampuan moral yang baik akan lebih memilih mengikuti aturan yang ada dan menghindari kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Perilaku individu dapat menjadi salah satu faktor munculnya tindakan *fraud*, hal tersebut disebabkan jika individu tersebut memiliki moral yang buruk maka meskipun dengan efektifnya pengendalian internal suatu entitas maka individu tersebut akan mencari kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Nashruah & Wijayanti, (2019) menjelaskan bahwa tingginya moralitas individu yang dimiliki seseorang maka individu tersebut akan semakin memperhatikan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan menghindarkan diri untuk berbuat suatu kecenderungan *fraud* akuntansi.

Terjadinya tindak kecurangan pada suatu organisasi diakibatkan oleh moralitas individu yang dimiliki aparatur desa yang ada didalamnya. Didalam organisasi terdapat beranekaragam tingkat moralitas yang dimiliki oleh suatu lembaga. Maka dari itu, aparatur desa yang memiliki moral yang baik akan lebih memilih mengikuti aturan yang ada dan menghindar kecurangan untuk mendapat keuntungan pribadi.

## 7. Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada entitas. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong karyawan untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Sebaliknya, apabila seorang pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk perusahaan maka akan mendorong karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Kompensasi berperan penting untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja, berprestasi sehingga tinggi rendahnya kompensasi akan mempengaruhi kinerja (Permatasari et al., 2017). Dalam entitas maupun pemerintah desa kesesuaian kompensasi sangat penting diperhatikan karena ketidaksesuaian pemberian kompensasi dapat mendorong aparatur desa untuk melakukan tindakan kecurangan guna mendapatkan keuntungan pribadi.

### B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Wilda (2018)	Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .	Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Peran auditor internal berpengaruh positif

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
2.	Kurniawan & Izzati (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
3.	Sujana (2019)	dkk Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Whistleblowing System</i> , dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam pengelolaan Dana Bumdes.	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dapat diterima. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
4.	Siti Rodiah dkk (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi	Pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
5.	Armelia Wahyuni (2020)	& Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan <i>Moral Sensitivity</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	Kompetensi aparatur desa tidak secara signifikan mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> pada manajemen keuangan pedesaan di Kecamatan Banjar. Efektivitas pengendalian internal mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> secara

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			positif dan signifikan. Adanya pengaruh secara positif dan juga signifikan antara variabel <i>moral sentivity</i> dengan pencegahan <i>fraud</i> .
6.	Eldayanti dkk (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	Hasil penelitian untuk kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ) dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ) dalam pengelolaan keuangan desa.
7.	Islamiyah (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan <i>Whistleblowing</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak.	Kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa
8.	Widyani Erlina & Wati (2020)	Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Blahbatuh.	Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. integritas aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Ayem & Kusumasari (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi.	Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas sebagai variabel mediasi.
10.	Romadaniati dkk (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.	Kompetensi aparatur desa berpengaruh pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa. sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa. <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.
11.	Dewi & Saiful (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pemerintah Daerah : Peran <i>Intervening</i> Perilaku Tidak Etis.	Pengaruh keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . Asimetri informasi dan moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> . Sedangkan perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fraud</i> . Kemudian keefektifan pengendalian internal dan moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis. Kesesuaian kompensasi dan asimetri

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
12.	Mulyanto dkk (2021)	Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa.	informasi berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku tidak etis. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Motivasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa.

*Sumber Data penelitian terdahulu diolah tahun 2022*

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dengan kategori, efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan yang berlaku.

Pengendalian internal yang terdapat dalam sebuah instansi atau organisasi tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan organisasi tersebut. Pengendalian internal sangat penting dilakukan dengan tujuan meminimalisir adanya kesempatan terjadinya kelalaian dan perilaku yang melenceng dari aturan yang ada. Jadi, niat seseorang melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya kesempatan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Kesempatan terjadinya kecurangan tersebut bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian internal yang baik, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan maka upaya untuk pencegahan kecurangan akan semakin baik.

Kaitannya dengan *teori pentagon* yaitu pada tahap *opportunity*, dimana pada tahap ini dimana aparat desa akan melakukan tindakan kecurangan apabila terdapat kesempatan untuk melakukannya. Terdapat kesempatan itu terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah, dan peraturan organisasi yang kurang ketat. Adanya sistem pengendalian

internal maka akan meminimalisir terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa dan terhindar dari kesalahan serta tindakan ilegal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Penelitian Permatasari et al., (2017), Siregar & Hamdani (2018), dan Rahmah & Haryoso (2018) menunjukkan bahwa hasil penelitian sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Penelitian dari Dewi & Saiful, (2021) juga menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Sistem pengendalian internal akan sangat bergantung terhadap komitmen serta niat baik dari seluruh aparatur pemerintah desa. Kecurangan dapat dicegah apabila pengendalian internal dilakukan secara efektif yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Pengendalian internal ini penting dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kelalaian dan perilaku yang melenceng dari peraturan yang ada. Semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan maka upaya pencegahan kecurangan akan semakin baik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis :

***H1 : Efektifitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa***

## **2. Pengaruh Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Budaya organisasi merupakan kebiasaan yang ada dalam suatu organisasi atau suatu sistem yang berisi norma-norma berperilaku, moral yang harus dianut oleh setiap orang untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya etis organisasi sangat penting karena dapat mempengaruhi cara

bekerja dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku yang baik dan berperilaku. Jika budaya disuatu organisasi mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, maka akan berdampak negatif bagi organisasi itu sendiri, sehingga sulit bagi organisasi untuk meraih tujuan yang ingin dicapai.

Kaitannya dengan *teori pentagon* yaitu pada tahap *rationalize*, dimana pada tahap ini seorang aparatur desa memiliki situasi yang cukup menekan sehingga aparatur desa akan menganggap hal tersebut menjadi wajar dan merasa benar terhadap sikapnya. Dengan nilai dan norma yang diterapkan dengan baik pada suatu organisasi, maka akan meminimalisir tindakan kecurangan, namun apabila suatu nilai dan norma tidak diterapkan dengan baik maka tindak kecurangan akan dianggap wajar dan membenarkan sikapnya. Karena budaya etis organisasi dapat juga dimaknai sebagai sistem bersama yang dianut oleh para anggota. Budaya etis organisasi yang baik tidak membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* karena membentuk orang-orang yang ada didalam organisasi mempunyai rasa ikut memiliki, maka *fraud* dapat dicegah bahkan dapat diberantas.

Budaya etis organisasi yang kokoh dapat menurunkan kecenderungan fraud akuntansi, dengan membangun budaya etis organisasi perilaku seseorang dapat terpengaruhi dan budaya organisasi yang etis diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja organisasi (Nashruah & Wijayanti, 2019). Kecenderungan kecurangan dapat

diminimalisasi dan dicegah dengan budaya etis organisasi. Baiknya budaya etis organisasi maka moral individu pada organisasi tersebut baik. Hasil penelitian Siregar & Hamdani, (2018) adalah budaya organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap pencegahan fraud. Dengan budaya etis organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis :

***H2 : Budaya Etis Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa***

### **3. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Moralitas merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia atau seseorang tentunya aparatur desa untuk mewujudkan pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa sesuai harapan. Sikap atau perilaku seseorang dalam mengedepankan nilai-nilai moral sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan haruslah ada dalam dirinya. Nashruah & Wijayanti (2019) menjelaskan bahwa tingginya moralitas individu yang dimiliki seseorang maka individu tersebut akan semakin memperhatikan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan menghindarkan diri untuk berbuat suatu kecenderungan fraud akuntansi. Sehingga dalam hal ini tentu saja aparatur desa yang baik adalah yang mempunyai sikap baik dan berperilaku jujur kepada sesama aparatur desa terutama kepada masyarakat.

Kaitannya dengan *teori pentagon* yaitu pada tahap *pressure* karena moral dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan kerja, organisasi,

serta lingkungan keluarga. Dengan terpengaruhi oleh tindakan *fraud pentagon* maka tidak dapat dipungkiri apabila seorang aparatur desa melakukan tindak kecurangan. Seseorang atau aparatur desa yang tidak menjunjung tinggi moralitas akan mengambil keputusan atas keinginannya sendiri serta mengabaikan kewajiban dan peraturan yang seharusnya dipenuhi. Maka dalam hal ini perlu upaya untuk mencegah tindakan tersebut, yaitu dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu.

Penelitian Dewi & Saiful, (2021) menunjukkan hasil moralitas individu memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Seseorang dengan penalaran moral tinggi dalam melakukan tindakannya ia lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya dan mendasari tindakannya pada prinsip moral yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis :

***H3 : Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa***

#### **4. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa**

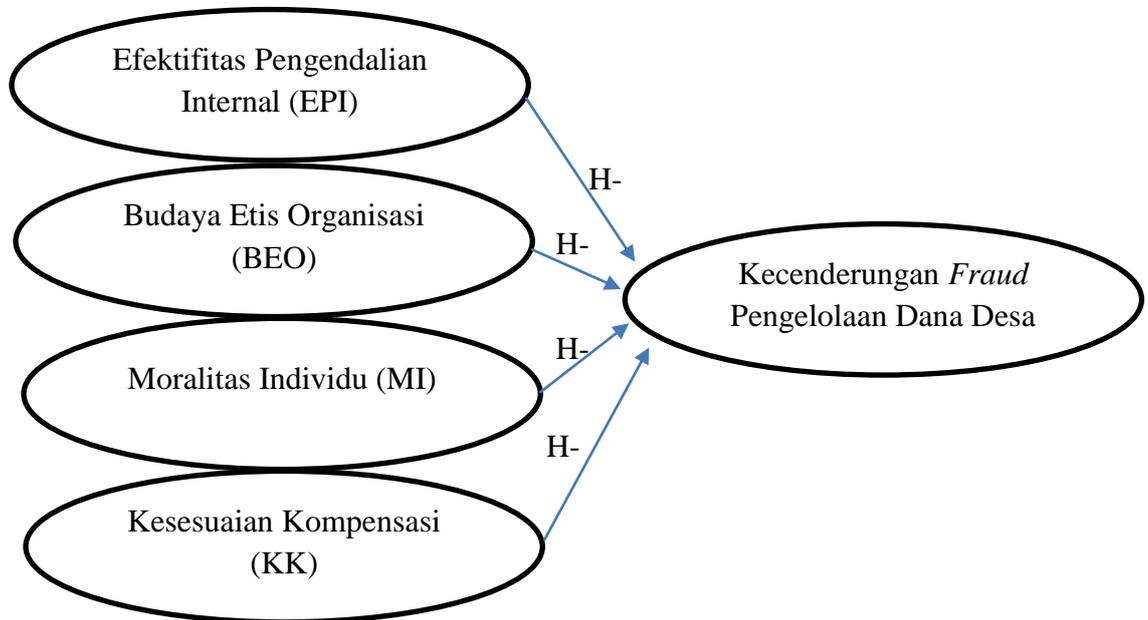
Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada entitas. Kompensasi berperan penting untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja, berprestasi sehingga tinggi rendahnya kompensasi akan mempengaruhi kinerja. Dalam entitas maupun pemerintah desa kesesuaian kompensasi sangat penting diperhatikan karena ketidaksesuaian pemberian

kompensasi dapat mendorong aparatur desa untuk melakukan tindakan kecurangan guna mendapatkan keunguntungan pribadi.

Kaitannya dengan *teori pentagon* yaitu pada tahap tekanan (*pressure*). Dalam tahapan ini yang menjadikan individu melakukan kecurangan yaitu karena adanya tekanan finansial, tekanan emosional, tekanan gaya hidup, tekanan dari manajemen, dan tekanan dari kondisi lingkungan sekitar.

Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Artinya semakin rendah tingkat kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada pegawai maka tidak memberikan pengaruh terhadap fraud. Penelitian Permatasari et al., (2017) dan Siregar & Hamdani (2018) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada aparatur desa dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada aparatur desa dalam bekerja, sehingga mendorong aparatur desa untuk memberikan yang terbaik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis :

***H4 : Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif Terhadap Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa***

**D. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2. 1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pengambilan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah suatu wilayah atau suatu objek dimana didalam objek tersebut memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan nantinya akan ditarik kesimpulan untuk dilakukan sebuah penelitian (Sugiyono, 2018). Populasi dari penelitian ini adalah 21 desa kantor pemerintah desa yang berada di Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Populasi tersebut dipilih karena terdapat tindak kecurangan pada salah satu desa di Kecamatan Loano. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, moralitas individu dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan harapan peneliti bahwa 21 desa di Kecamatan Loano tidak ada lagi kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018), dengan jumlah responden sebanyak 84 responden. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Berikut merupakan kriteria dalam penelitian ini :

- a) Aparatur desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, dan Tim Penggerak Kegiatan (TPK)
- b) Memiliki masa kerja minimal 6 bulan

c) Pendidikan minimal SLTA/sederajat

**Tabel 3. 1**  
**Sampel Data**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Struktur Perangkat Desa</b>
1.	Desa Banyuasin Kembaran	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
2.	Desa Banyuasin Separe	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
3.	Desa Guyangan	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
4.	Desa Jetis	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
5.	Desa Kali Glagah	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
6.	Desa Kalikalong	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
7.	Desa Kalinongko	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
8.	Desa Kalisemo	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
9.	Desa Karangrejo	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
10.	Desa Kebon Gunung	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan

**Tabel 3.1**  
**Sampel Data (Lanjutan)**

No.	Nama Desa	Struktur Perangkat Desa
11.	Desa Kedungpoh	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
12.	Desa Kemejing	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
13.	Desa Loano	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
14.	Desa Maron	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
15.	Desa Mudalrejo	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
16.	Desa Ngargosari	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
17.	Desa Rimun	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
18.	Desa Sedayu	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
19.	Desa Tepansari	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan
20.	Desa Tridadi	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan

**Tabel 3.1**  
**Sampel Data (Lanjutan)**

No.	Nama Desa	Struktur Perangkat Desa
21.	Desa Trirejo	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Tim Penggerak Kegiatan

*Sumber : data penelitian diolah, 2022*

## **B. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer ini mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan variabel keterkaitan untuk tujuan tertentu. Data primer yang digunakan adalah hasil kuesioner yang akan diolah menggunakan program IBM SPSS 25. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari aparaturnya desa de-Kecamatan Loano Kabupaten Magelang.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner berupa pertanyaan yang menjadi instrument variabel yang akan disebarkan kepada 21 kantor desa dengan responden sebanyak 84responden yang berada di kecamatan Loano. Lembar kuesioner tersebut disebarkan langsung kepada responden yang berupa kuesioner dalam bentuk *print out*. Sebelum diberikan kepada responden, kuesioner dibuat dipastikan mudah dipahami dan dimengerti oleh responden, agar memudahkan responden dalam menjawab.

### C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 3. 2**  
**Definisi dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Hasil Penelitian
Variabel dependen		
1. Kecenderungan Fraud	Ikatan Akuntan Indonesia (2001) menyatakan bahwa fraud sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang memicu tindakan fraud seperti salah saji, manipulasi data, mengungkapkan laporan keuangan dengan tujuan untuk membohongi para pemakai laporan keuangan.	Instrumen penelitian ini mengacu dari penelitiannya (Dewi & Saiful 2021) dengan 3 item pernyataan untuk indikatornya : 1) Kecurangan pada laporan keuangan 2) Penyalahgunaan aset 3) Korupsi Diukur menggunakan skala likert 1-5. Skala 1= Sangat Tidak Setuju sampai skala 5= Sangat Setuju
Variabel Independen		
2. Efektifitas Pengendalian Internal (EPI)	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem pengendalian internal yang secara keseluruhan dilakukan baik di lingkungan pusat maupun daerah.	Instrumen penelitian ini mengacu dari penelitiannya (Dewi & Saiful 2021) dengan 4 item pernyataan untuk indikatornya : 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian mengenai risiko 3) Informasi dan komunikasi 4) Pemantauan kegiatan pengendalian internal Diukur menggunakan skala likert 1-5. Skala 1= Sangat Tidak Setuju sampai skala 5= Sangat Setuju

**Tabel 3.2**  
**Definisi dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
3. Budaya Etis Organisasi (BEO)	Edger Schein yang mengatakan budaya organisasi diartikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan dari pola pemikiran, dimana anggota kelompok sama-sama belajar beradaptasi untuk mengembangkan suatu ide untuk mengatasi masalah yang terjadi dari pihak eksternal maupun pihak internal.	Instrumen penelitian ini mengacu dari penelitiannya (Siti Rodiah, Ika Ardianni, & Aftania Herlina 2019) dengan 5 item pernyataan untuk indikatornya : 1) Inovasi dan pengambilan risiko 2) Orientasi hasil 3) Orientasi orang 4) Orientasi tim 5) Keagresifan  Diukur menggunakan skala likert 1-5. Skala 1= Sangat Tidak Setuju sampai skala 5= Sangat Setuju
4. Moralitas Individu (MI)	Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa moralitas timbul ketika seseorang melakukan kebaikan atas dasar kesadaran atas kewajiban dan tanggungjawabnya, dan bukan karena ingin memperoleh keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya	Instrumen penelitian ini mengacu dari penelitiannya (Dewi & Saiful 2021) dengan 4 item pernyataan untuk indikatornya : 1) Kejujuran 2) Keterbukaan 3) Ketepatan waktu 4) Kinerja  Diukur menggunakan skala likert 1-5. Skala 1= Sangat Tidak Setuju sampai skala 5= Sangat Setuju

**Tabel 3.2**  
**Definisi dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)**

Variabel	Definisi Operasional	Hasil Penelitian
5. Kesesuaian Kompensasi (KK)	Hariandja (2005) kesesuaian kompensasi adalah suatu bentuk balas jasa yang didapatkan seluruh pegawai sebagai bentuk imbalan dikarenakan telah menyelesaikan pekerjaannya yang dapat berupa uang atau lainnya seperti gaji, bonus, upah dan insentif serta tunjangan lainnya.	Instrumen penelitian ini mengacu dari penelitiannya (Dewi & Saiful 2021) dengan 6 item pernyataan untuk indikatornya : 1) Kompensasi keuangan 2) Pengakuan organisasi atas keberhasilan melaksanakan pekerjaan 3) Promosi 4) Penyelesaian tugas 5) Pencapaian sasaran 6) Pengembangan pribadi  Diukur menggunakan skala likert 1-5. Skala 1= Sangat Tidak Setuju sampai skala 5= Sangat Setuju

*Sumber : data penelitian terdahulu diolah, 2022*

#### **D. Metode Analisis Data**

##### **1. Statistik Deskripsif**

Bertujuan untuk memberikan informasi mengenai gambaran data yang diolah dan karakteristik responden dengan mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, jumlah responden, standar deviasi, berdasarkan instrument dalam variabel penelitian yang telah diisi oleh responden.

## 2. Uji Instrumen

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*Reliability*), tingkat keabsahan (*Validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

## 3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kuesioner apakah handal atau reliabel apabila jawaban dari seseorang pada pernyataan selalu konsisten. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila dapat memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$  (Ghozali, 2018).

## 4. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat dinyatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Uji instrumen validitas diperoleh bahwa nilai dari *Pearson Correlation* untuk setiap item pernyataan lebih besar dari 0,1956 maka dapat disimpulkan setiap item pernyataan dalam kuesioner valid.

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas butir item instrumen penelitian ini yaitu teknik analisis faktor. Teknik analisis faktor digunakan untuk melihat apakah item-item yang ada tersebut mewakili aspek atau dimensi yang seharusnya diukur. Selain itu analisis faktor juga dilakukan

untuk menunjukkan apakah arah aspek atau dimensi tersebut saling berkaitan atau tidak.

## 5. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* statistik SPSS 25.0. Sebelum dianalisis, dilakukan pengujian instrumen penelitian yang terdiri atas uji validitas menggunakan koefisien korelasi ( $r$ ) *Pearson* dan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik sebagai syarat regresi berganda. Model dasar persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KFPDD = a + \beta_1 EPI + \beta_2 BEO + \beta_3 MI + \beta_4 KK + \varepsilon$$

Keterangan :

$KFPDD$  = Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

$EPI$  = Efektifitas Pengendalian Internal

$BEO$  = Budaya Etis Organisasi

$MI$  = Moralitas Individu

$KK$  = Kesesuaian Kompensasi

$a$  = Nilai konstanta

$\beta_1-\beta_4$  = Koefisien regresi

$\varepsilon$  = Error

Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dihitung dengan mencari koefisien determinasi atau  $R^2$ . Pengujian hipotesis terdiri atas uji t dan uji F.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

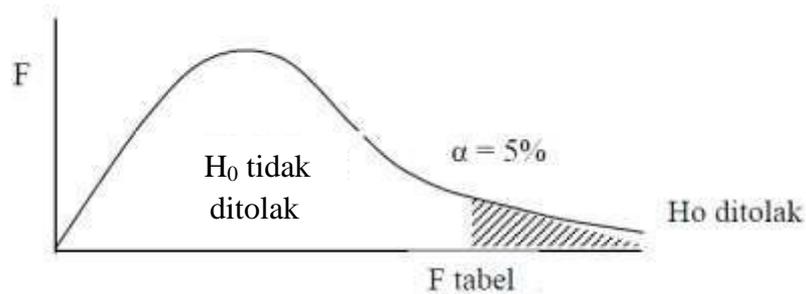
Uji  $R^2$  digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas (variabel independen) yang dimasukkan ke dalam model yang mempengaruhi variabel terikat (variabel dependen), dan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini mempengaruhi persentasenya yang lain. Tingkat akurasi regresi diwakili oleh koefisien ( $R^2$ ) antara nilai-nilai 0-1. Jika  $R^2$  menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen bersama-sama.

### b. Uji F

Digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu :

- 1) Jika nilai signifikansi  $<0,05$ , maka model yang digunakan dikatakan layak.
- 2) Jika nilai signifikansi  $>0,05$ , maka model yang digunakan dikatakan tidak layak.

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh selanjutnya akan dikonversikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan.



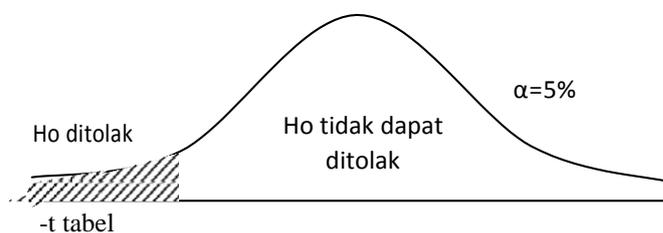
**Gambar 3. 1**  
**Penerimaan Uji F**

**c. Uji-t**

Uji-t digunakan untuk menjelaskan sejauh mana mengenai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah:

Dasar kriteria penerimaan hipotesis negatif :

- 1) Jika  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $P\ value < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  atau  $P\ value > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_a$  tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.



**Gambar 3. 2**  
**Uji t Kriteria Negatif**

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bermaksud untuk mengetahui dampak dari efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada kantor desa se-Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 79 responden yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, serta tim penggerak kegiatan (TPK). Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Temuan hasil penelitian ini efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Efektifitas pengendalian internal tidak berpengaruh, hal ini dikarenakan tingkat *fraud* dapat disebabkan oleh faktor kesempatan yang ada dalam pemerintahan. Sedangkan budaya etis organisasi juga tidak berpengaruh karena hal tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan lain di luar organisasi.

#### B. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas. Dapat dilihat dalam hasil Adjust R Square, bahwa variabel yang digunakan menjelaskan Kecenderungan

*Fraud* sebesar 17,5% sehingga masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi Kecenderungan *Fraud*.

2. Peneliti tidak bisa mengontrol jawaban yang diberikan oleh responden apakah sesuai dengan yang mereka alami secara nyata atau tidak.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu tim penggerak kegiatan (TPK) dari beberapa TPK yang ada di desa sebagai sampel.

### **C. Saran**

1. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel yang bisa mempengaruhi kecenderungan *fraud* misalnya *whistleblowing system* yaitu dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Sistem ini merupakan wadah untuk mengungkapkan dan melaporkan tindak kecurangan yang bertujuan untuk meminimalisir, mendeteksi kemudian menghilangkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah sampel yang akan dimasukkan dengan cara memperluas lokasi sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan ( Fraud ). *Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10. <https://jurnal.pekalongankota.go.id/index.php/litbang/article/viewFile/39/37>
- Albar, T. M., & Fitri, F. A. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Etika Organisasi, Keadilan Kompensasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 527–537.
- Amrizal. (2015). *Pencegahan dan Pendeteksian kecurangan Oleh Internal Auditor*.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Dewi Septiningsih, & Saiful Anwar. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pemerintah Daerah: Peran Intervening Perilaku Tidak Etis. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 17–35. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.012>
- Fitri, Y. (2016). Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Akuntansi, Asimetri Informasi Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat . *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 3 No. 1, 505–519.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*.
- Indriastuti, D. E., -, A.-, & -, A.-. (2017). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *InFestasi*, 12(2), 115. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2763>
- Ismi, C., 2018, & Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud. (2018). *3809-7435-1-Sm*.
- Maulidya, Z., & Fitri, Y. (2020). Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Kota). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 127–136.
- Muna, B. N., & Harris, L. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Penelitian Persepsi Pengelola Keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri BLU). *Jurnal*

*Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* /, 6(1), 35.

- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: persepsi pegawai. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267.
- Nashruah, N. U., & Wijayanti, P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 141. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.141-153>
- Padhilah, S. F. N., & Burhany, D. I. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Industrial Research ...*, 881–887. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2137>
- Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) di Sektor Pemerintah ( Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37–44.
- Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 35–43.
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104–124. <https://doi.org/10.1108/02686900810839820>
- Rahmah, R. N., & Haryoso, P. (2018). Pengaruh Moralitas Individu, Efektifitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Journal Stie Aub*, 5(2), 33–41. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/414>
- Rahmi, F., & Sovia, A. (2017). Dampak Sistem Pengendalian Internal, Prilaku Tidak Etis, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Developer Di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 13(1), 48. <https://doi.org/10.24014/jiq.v13i1.4388>
- Rodiah, S., Ardianni, I., Herlina, A., Akuntansi, P., Ekonomika, F., & Bisnis, D. (2019). *The Effect of Internal Control, Compliance with Accounting Rules, Management Morality and Organization Culture to Accounting Fraud*. [www.news.okezone.com](http://www.news.okezone.com)
- Romney, M. B., Steinbart, P. J., Ketigabelas, E., Saputra, A., & Sibarani, J. R. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Siregar, M. I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Kompensasi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, Vol. 9(No. 1), Edisi Juli.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id). (2021).
- [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com).
- [www.nasional.tempo.co/](http://www.nasional.tempo.co/).
- [www.purworejo24.com](http://www.purworejo24.com).
- [www.purworejokab.go.id](http://www.purworejokab.go.id).
- Yulianti, D. F. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Penegakna Hukum, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervenig (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3(1), 2177–2191.
- Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 1–4.